
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN JOKOWI (2014-2024) DI SURABAYA : Akses Pekerjaan dan Kualitas Pelayanan Publik

Zuhanidz Larasati Suhari^a, Silkania Swarizona^b

^{ab} Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia
E-mail: zuhanidz.22175@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan nasional pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2024) yang menunjukkan intensitas pembangunan infrastruktur dan program sosial-ekonomi berskala luas, namun juga disertai dengan kecenderungan autokratisasi. Keadaan ini berdampak pada demokrasi dan keadilan sosial, dimana kecenderungan politik tersebut memengaruhi akses pekerjaan dan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan strategis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis terhadap pemberitaan media lokal, didukung data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik dan kajian literatur. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan inovasi digital dalam pelayanan publik dan *program* pelatihan kerja, kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan struktural. Proyek pembangunan nasional seperti Surabaya *Waterfront Land* juga menimbulkan dampak negatif terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Transformasi digital belum sepenuhnya mampu mengatasi birokrasi dan potensi praktik korupsi. Penurunan angka kemiskinan tidak sejalan dengan peningkatan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak kebijakan Jokowi di Kota Surabaya bersifat paradoksal: menciptakan kemajuan teknokratis, namun belum menjamin keadilan sosial bagi kelompok marjinal. Implikasinya, penguatan partisipasi publik dan akuntabilitas lokal sangat diperlukan untuk menyeimbangkan efek autokratisasi nasional.

Kata Kunci: Autokratisasi, Akses Pekerjaan, Pelayanan Publik, Kelompok Rentan, Ketimpangan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to examine national policies during President Joko Widodo's administration (2014–2024), which demonstrated the intensity of infrastructure development and large-scale socio-economic programs, but also accompanied by autocratic tendencies. This situation has an impact on democracy and social justice, where these political tendencies influence access to employment and the quality of public services in Surabaya, a strategic metropolitan city. The study uses a qualitative approach with critical discourse analysis methods on local media coverage, supported by quantitative data from the Central Statistics Agency and a literature review. The results show that despite increasing digital innovation in public services and job training programs, vulnerable groups such as women and people with disabilities still experience structural barriers. National development projects such as the Surabaya Waterfront Land also have negative impacts on the livelihoods of coastal communities. Digital transformation has not fully overcome bureaucracy and the potential for corruption. The decline in poverty rates has not been accompanied by increasing income inequality. This study concludes that the impact of Jokowi's policies in Surabaya is paradoxical: creating technocratic progress, but not guaranteeing social justice for marginalized groups. The implication is that strengthening public participation and local accountability is essential to balance the effects of national autocratization..

Keywords: Autocratization, Job Access, Public Services, Vulnerable Groups, Social Inequality.

* Corresponding Author.

E-mail: zuhanidz.22175@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Periode pemerintahan Joko Widodo (2014–2024) ditandai oleh ekspansi besar pembangunan infrastruktur dan program sosial-ekonomi yang diproyeksikan mendorong pemerataan kesejahteraan. Namun, berbagai laporan ilmiah dan kajian demokrasi menunjukkan adanya regresi demokrasi yang memengaruhi kualitas kelembagaan publik, termasuk melemahnya fungsi pengawasan, meningkatnya sentralisasi kekuasaan, serta berkurangnya ruang partisipasi warga. Kondisi politik ini membentuk konteks penting dalam menilai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan dalam praktik pemerintahan di tingkat daerah.

Di tengah kondisi tersebut, Surabaya menjadi lokasi penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan secara konkret. Kota ini menerima penghargaan SPBE nasional, memperluas layanan digital, dan menawarkan berbagai program pelatihan kerja. Namun, data BPS menunjukkan kesenjangan gender dalam TPAK, fluktuasi TPT yang masih di atas rata-rata provinsi, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Temuan media lokal juga menunjukkan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pesisir masih menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh pekerjaan dan mengakses layanan publik secara setara.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti beberapa aspek terkait dinamika sosial-ekonomi dan pelayanan publik. Isnaini dkk. (2025) misalnya menekankan kualitas pelayanan administrasi publik dalam konteks perdesaan, sementara Larasati dkk. (2024) mengkaji implementasi perlindungan disabilitas di Kota Surabaya dan menemukan lemahnya penegakan kuota serta minimnya akses informasi bagi penyandang disabilitas. Budiarti dkk. (2022) menunjukkan bahwa kelompok rentan secara nasional masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses layanan dan pekerjaan. Di sisi lain, penelitian Almasiyah (2021) dan Abubakar dkk. (2019) menyoroti dampak pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan masyarakat lokal dan mata pencaharian nelayan.

Walaupun penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran penting, ada kesenjangan ilmiah (*research gap*) yang belum terjawab. Pertama, riset mengenai interaksi antara regresi demokrasi di tingkat nasional dan dampaknya terhadap akses pekerjaan di kota besar seperti Surabaya masih sangat terbatas. Sebagian besar studi hanya melihat pelayanan publik atau isu ketenagakerjaan secara sektoral, tanpa menghubungkannya dengan konteks politik yang lebih luas. Kedua, penelitian terdahulu belum menelaah secara komprehensif bagaimana kelompok rentan di kota metropolitan mengalami tekanan ganda: modernisasi layanan publik yang tidak merata, persaingan pasar tenaga kerja, serta dampak pembangunan berskala besar seperti proyek Surabaya Waterfront Land. Ketiga, belum ada studi yang secara simultan membandingkan klaim keberhasilan pemerintah (digitalisasi layanan, penurunan kemiskinan, pembukaan bursa kerja) dengan keluhan publik mengenai birokrasi, pungutan liar, hingga ketimpangan akses layanan.

Berdasarkan konteks dan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini menawarkan *novelty* dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menghubungkan kecenderungan autokratisasi nasional dengan dinamika sosial-ekonomi lokal, khususnya akses pekerjaan dan pelayanan publik sesuatu yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan dua dimensi tersebut. Kedua, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis media lokal yang dipadukan dengan data kuantitatif BPS, sehingga memberikan pemetaan yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana kelompok rentan di Surabaya merasakan dampak kebijakan negara dalam keseharian mereka. Dengan latar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penting: apakah kelompok rentan mengalami hambatan yang lebih besar dalam mengakses pekerjaan pada periode 2014–2024, dan bagaimana kualitas serta pemerataan akses layanan publik berkembang dalam konteks digitalisasi dan regresi demokrasi nasional.

Tabel 1. Research Gap & Novelty Mapping

Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan / GAP	Posisi & Kebaruan Penelitian Ini
Isnaini dkk. (2025)	Kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan (desa).	Menemukan hambatan SDM dan kendala pelayanan dasar.	Tidak membahas konteks regressi demokrasi dan tidak melihat kota besar.	Menilai kualitas pelayanan publik Surabaya dengan perspektif politik nasional dan digitalisasi.
Larasati dkk. (2024)	Implementasi perlindungan penyandang disabilitas di Surabaya.	Lemahnya penegakan kuota & akses informasi.	Fokus hanya pada isu disabilitas, tidak menghubungkan dampak kebijakan nasional.	Melihat disabilitas sebagai bagian dari kelompok rentan dalam konteks dampak kebijakan Jokowi.
Budiarti dkk. (2022)	Kebutuhan hukum kelompok rentan (nasional).	Kelompok rentan menghadapi hambatan regulasi dan akses layanan.	Tidak memasukkan variabel pembangunan infrastruktur dan ketenagakerjaan kota.	Mengkaji hambatan layanan dan akses pekerjaan secara spesifik di Surabaya.
Almasiyah (2021)	Dampak pembangunan infrastruktur terhadap pendapatan UMKM Surabaya.	Infrastruktur besar dapat memengaruhi penghasilan pelaku lokal.	Tidak melihat aspek politik nasional atau kelompok rentan.	Mengkaji hambatan layanan dan akses pekerjaan secara spesifik di Surabaya.
Abubakar dkk. (2019)	Dampak reklamasi terhadap mata pencaharian nelayan.	Pembangunan memengaruhi penghasilan dan ekologi pesisir.	Berfokus pada satu proyek dan tidak menilai sistem kebijakan nasional.	Menganalisis proyek Surabaya Waterfront dalam kerangka autokratisasi & sentralisasi kebijakan.
Febriandy & Wahid (2024)	Regresi demokrasi nasional.	Demokrasi melemah dan berdampak pada stabilitas sosial.	Tidak menurunkan analisis ke level kota dan dampak sosial-ekonomi lokal.	Menghubungkan regresi demokrasi dengan akses pekerjaan dan layanan publik di Surabaya.
Penelitian Ini	Dampak kebijakan Jokowi terhadap akses pekerjaan & pelayanan publik di Surabaya.	Kelompok rentan mengalami hambatan struktural; digitalisasi belum merata; proyek nasional menekan masyarakat pesisir; terjadi paradoks pembangunan.	-	Novelty: Menggabungkan perspektif autokratisasi nasional, dinamika kelompok rentan, pembangunan besar, dan kualitas layanan publik kota secara terpadu.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis wacana kritis terhadap pemberitaan media lokal Surabaya periode 2014–2024. Pendekatan ini dipilih untuk melihat bagaimana narasi kebijakan, respons masyarakat, serta fenomena ketimpangan akses pekerjaan dan pelayanan publik dikonstruksi dalam ruang media. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar kedua yang menjadi titik interaksi antara kebijakan nasional dan dinamika sosial-ekonomi lokal. Adapun Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Pemberitaan media lokal Surabaya yang relevan dengan isu ketenagakerjaan, pelayanan publik, proyek strategis, serta kelompok rentan;
2. Artikel jurnal nasional terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo, autokratisasi, ketimpangan sosial, dan akses pekerjaan;
3. Data kuantitatif dari BPS Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, seperti TPT, Gini Ratio, angka kemiskinan, serta laporan kinerja pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan studi literatur, mencakup arsip berita digital, basis data akademik, serta publikasi pemerintah. Dokumen dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kemudian diorganisasi secara sistematis, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis konten kualitatif. Prosesnya meliputi pengkodean untuk mengidentifikasi tema utama, pengelompokan kategori, serta membaca pola hubungan antara narasi media, data statistik, dan literatur akademik. Data kuantitatif BPS digunakan untuk memperkuat atau mengontraskan temuan kualitatif sehingga interpretasi yang dihasilkan lebih utuh dan terverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tren Ketenagakerjaan di Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi secara aktif mengklaim keberhasilan dalam menekan angka pengangguran. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemulihan sektor pariwisata, serta implementasi program padat karya. Pembentukan "Rumah Padat Karya" di berbagai kecamatan disebutkan sebagai salah satu wujud *program* tersebut, yang diklaim telah menyerap banyak tenaga kerja sehingga secara otomatis mengurangi pengangguran (Pemerintah Kota Surabaya, 2022).

Namun, data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun mengalami fluktuasi, TPT Kota Surabaya pada tahun 2023 masih mencapai 6,76%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur yang sebesar 4,88% pada tahun yang sama. Pada tahun 2022, TPT Surabaya tercatat sebesar 7,62%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan pengangguran di Surabaya masih signifikan meskipun telah dilakukan berbagai upaya lokal yang diklaim berhasil.

Secara nasional, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga telah meluncurkan program Kartu Prakerja. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja serta memberikan kesempatan melakukan *reskilling* atau *upskilling* bagi pencari kerja dan pekerja yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program tersebut merupakan intervensi pemerintah pusat yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan akses pekerjaan di berbagai daerah, termasuk Kota Surabaya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019). Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Surabaya dan Jawa Timur untuk tahun-tahun yang tersedia dalam rentang 2014-2024:

Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya dan Jawa Timur (2022-2023)

Tahun	TPT Kota Surabaya (%)	TPT Jawa Timur (%)
2022	7,62	5,49
2023	6,76	4,88

Sumber : BPS Kota Surabaya

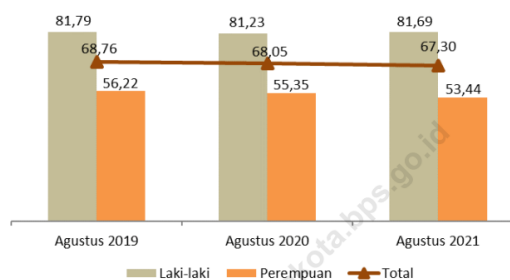
Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan TPT di Kota Surabaya dari tahun 2022 sampai tahun 2023, namun angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di daerah.

2. Akses Pekerjaan bagi Kelompok Rentan

Pada dasarnya berbagai upaya untuk meningkatkan akses pekerjaan telah dilakukan, namun upaya tersebut belum mampu menjangkau kelompok-kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan menunjukkan bahwa perempuan dan penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang setara dan layak di Kota Surabaya (Budiarti dkk, 2022).

Gambar 1. TPAK Menurut Jenis Kelamin Kota Surabaya, 2019-2021

"TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan"



Sumber: BPS Kota Surabaya

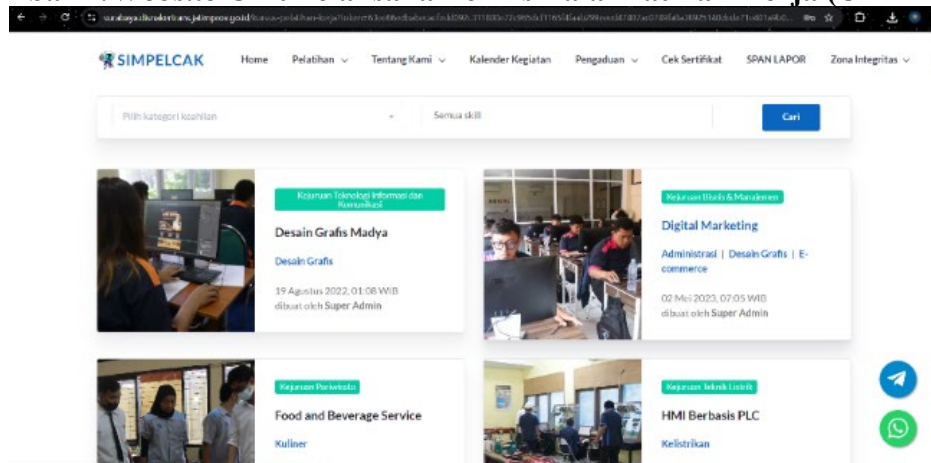
Bagi perempuan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Surabaya pada Agustus 2021 masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (53,44% untuk perempuan vs 81,69% untuk laki-laki). Perempuan cenderung lebih banyak terserap di sektor informal, dimana kondisi ini disebabkan adanya norma sosial serta budaya tertentu yang dapat menghambat partisipasi perempuan dalam program pendidikan non-formal yang seharusnya dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka. Dengan demikian keberadaan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses pekerjaan secara umum tidak serta-merta menjamin inklusivitas bagi semua kelompok (Universitas Negeri Surabaya, 2025).

Penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan yang substansial. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas, belum semua perusahaan di Surabaya mematuhi ketentuan tersebut. Selain itu, kurangnya informasi yang memadai tentang peluang kerja dan keterbatasan anggaran untuk pelatihan khusus disabilitas menjadi kendala tambahan yang memperparah kesulitan mereka dalam mendapatkan pekerjaan (Larasati dkk, 2024). Faktor-faktor struktural, seperti diskriminasi institusional dalam perekrutan dan kurangnya penegakan hukum terkait kuota disabilitas, serta faktor sosial-kultural, seperti norma gender yang membatasi peran perempuan, masih menjadi penghalang. Hal ini menjadi penanda bahwa meskipun ada upaya makro, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mengatasi akar masalah ketidaksetaraan akses pekerjaan bagi kelompok rentan. Harusnya kebijakan terkait kelompok rentan tersebut perlu di formulasikan dan penerapannya penuh ketegasan (Yulianto dan Eny, 2021).

3. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Mengatasi Pengangguran

Pemerintah Kota Surabaya telah mengimplementasikan berbagai program proaktif untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah penyelenggaraan bursa kerja yang kini dipermudah dengan sistem digital, memungkinkan pencari kerja mendaftar dan melamar secara paperless melalui *platform online* melalui laman disnaker.surabaya.go.id/assik (Pemerintah Kota Surabaya, 2025). Selain itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Surabaya telah berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, seperti tukang becak dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Inisiatif ini dipandang sebagai solusi struktural untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja informal, serta diharapkan dapat menjadi model nasional (Christy, 2025).

Gambar 2. *Website* Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK)



Sumber: *Web* Resmi SIMPELCAK

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kota Surabaya juga berperan penting, yakni dengan menyelenggarakan berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, termasuk kejuruan baru seperti *Public Speaking/English for Frontliner*. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, dengan misi khusus untuk mendukung kesejahteraan dan penyerapan kerja kelompok rentan.

4. Inovasi dan Capaian Pelayanan Publik di Surabaya

Pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi telah secara konsisten mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Puncaknya adalah peluncuran INA Digital (*GovTech*) yang bertujuan untuk mengintegrasikan ribuan layanan pemerintah ke dalam satu portal terpadu, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya birokrasi yang melayani dan tidak mempersulit masyarakat, serta perlunya integrasi data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Azhar, 2024).

Kota Surabaya telah menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah Kota Surabaya telah menerima penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia dari Presiden Jokowi pada Mei 2024, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi digital. Meskipun demikian, Wali Kota Surabaya mengakui bahwa penerapan SPBE belum sempurna dan proses transformasi digital ini masih dinamis serta memerlukan penyempurnaan berkelanjutan (Arka dan Mulyawan, 2024).

Mal Pelayanan Publik (MPP) di Gedung Siola Surabaya adalah contoh nyata keberhasilan integrasi layanan, menawarkan berbagai fasilitas seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), layanan konseling untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan bahkan jasa pijat tunanetra, yang semuanya dapat diakses secara gratis. Fasilitas ini menunjukkan upaya untuk menyediakan layanan yang inklusif dan mudah diakses. Selain itu, pembukaan sentra pelayanan publik baru di Terminal Intermoda Joyoboyo juga memperluas jangkauan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, mendekatkan layanan pemerintah kepada warga (Kominfo Jawa Timur, 2025).

5. Tantangan dalam Pelayanan Publik

Meskipun ada capaian signifikan dalam digitalisasi dan inovasi, tantangan dalam pelayanan publik di Surabaya masih menjadi perhatian. Isu-isu seperti birokrasi yang berbelit, kurangnya infrastruktur digital yang merata di semua tingkatan pemerintahan (terutama di kecamatan), keterbatasan keterampilan digital pada sebagian sumber daya manusia (SDM) aparatur, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas masih sering menjadi keluhan masyarakat.

Laporan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur menunjukkan adanya modus pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik, meskipun Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk memberantasnya melalui percepatan layanan dan transparansi informasi, termasuk melalui sanksi bagi petugas yang melanggar standar waktu pelayanan (Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa aspek integritas dan efisiensi masih memerlukan perhatian serius. Keberhasilan Surabaya dalam meraih penghargaan SPBE dan inisiatif digitalisasi menunjukkan adopsi teknologi yang kuat di permukaan. Namun, keluhan yang terus-menerus tentang birokrasi yang rumit, kendala SDM, dan praktik pungli mengindikasikan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya mengatasi masalah-masalah struktural dan budaya organisasi yang mendasar. Hal tersebut menunjukkan meskipun *front-end* layanan mungkin terlihat modern, *back-end* proses dan mentalitas aparatur mungkin belum sepenuhnya beradaptasi, menciptakan kesenjangan antara persepsi kualitas yang tinggi (dari penghargaan) dan pengalaman nyata masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi atau menghadapi praktik koruptif. Berikut adalah gambaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan capaian SPBE Kota Surabaya untuk tahun-tahun yang tersedia:

Tabel 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Capaian SPBE Kota Surabaya (2024)

Indikator	Nilai/Peringkat (Tahun 2024)
Nilai IKM (Juli-September 2024)	Bervariasi antara 3.33 - 3.85 (dari 9 unsur)
Capaian SPBE Pemkot Surabaya (Peringkat)	Terbaik se-Indonesia

Sumber : Kominfo Jatim

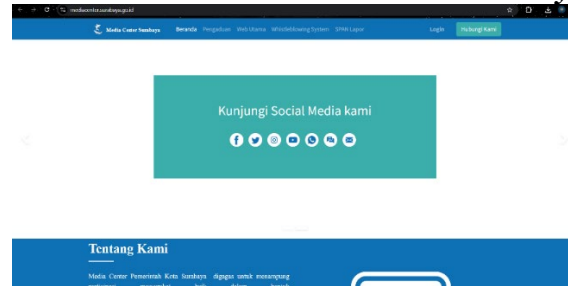
Tabel 3 menunjukkan adanya kontras antara pengakuan nasional terhadap kinerja SPBE Kota Surabaya dan nuansa dalam persepsi kepuasan masyarakat terhadap elemen-elemen layanan

tertentu. Hal ini menegaskan bahwa inovasi digital perlu diimbangi dengan perbaikan berkelanjutan pada aspek-aspek operasional dan kultural birokrasi.

6. Partisipasi Masyarakat dan Mekanisme Pengaduan

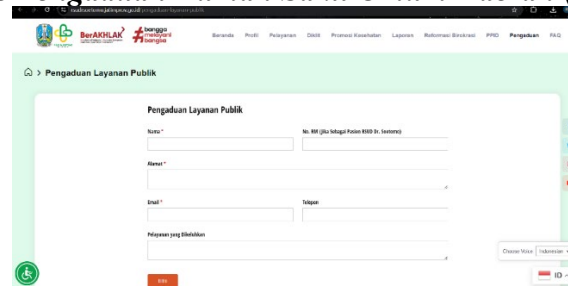
Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan, menunjukkan komitmen terhadap *good governance*. Media Center Surabaya mencatat ribuan pengaduan (5326 total pengaduan dengan 4677 selesai), dan tersedia aplikasi WargaKu serta nomor WhatsApp khusus untuk pengaduan integritas (0811-311-5777). Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo juga memiliki kanal pengaduan via WhatsApp. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi program dan inovasi pelayanan pengaduan. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan media lokal dan komunitas seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas publik dan responsivitas terhadap kebutuhan warga.

Gambar 3. Website Media Center Surabaya



Sumber: Web Resmi Media Center Surabaya

Gambar 4. Website Pengaduan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo



Sumber: Web Resmi Pengaduan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo

7. Keterkaitan antara tren politik nasional dengan dampak ekonomi dan kesetaraan sosial di tingkat lokal

Tren autokratisasi di tingkat nasional, yang ditandai dengan konsolidasi kekuasaan eksekutif dan pelemahan lembaga pengawas seperti KPK, memiliki implikasi tidak langsung namun signifikan terhadap dinamika ekonomi dan kesetaraan sosial di Surabaya. Ketika "demokrasi dikompromikan," sistem menjadi rentan, dan hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi secara keseluruhan (Febriandy dan Wahid, 2024). Fokus pemerintah pusat pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dilakukan melalui proyek infrastruktur berskala besar dan deregulasi, dapat mendorong model pembangunan yang terpusat. Konteks autokratisasi, pembangunan semacam ini berisiko menguntungkan kelompok elite atau korporasi tertentu, sementara partisipasi masyarakat lokal dan dampak sosial-lingkungan yang merugikan kurang diakomodasi (Mawardi, 2023).

Dalam rezim yang cenderung otoriter, keputusan pembangunan ekonomi berskala besar (misalnya proyek infrastruktur) sering kali dibuat secara *top-down*, dengan prioritas pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau investasi tanpa mempertimbangkan secara memadai dampak sosial dan lingkungan di tingkat lokal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara prioritas pembangunan sentralistik dan kebutuhan keadilan sosial lokal.

8. Analisis dampak proyek infrastruktur besar terhadap masyarakat lokal dan kesetaraan

Proyek-proyek strategis nasional yang berdampak di Kota Surabaya, seperti Surabaya Waterfront Land, telah menimbulkan kritik tajam. Proyek ini dilaporkan mengancam ruang hidup ribuan nelayan di Morokrembangan, merusak terumbu karang yang menjadi sumber mata pencarian, dan berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial karena desainnya yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Penambangan ilegal untuk material pembangunan juga memicu bencana lingkungan seperti banjir (Saputra, 2024). Nelayan di Morokrembangan melaporkan penurunan drastis pada area penangkapan ikan dan hasil tangkapan, yang menyebabkan penurunan pendapatan signifikan dan memaksa sebagian dari mereka untuk beralih profesi. Ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme demokratis yang kuat untuk memastikan keadilan distribusi dan perlindungan hak-hak masyarakat, pembangunan ekonomi yang ambisius dapat menjadi bumerang bagi kesetaraan sosial (Abubakar dkk, 2019).

Meskipun pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja jangka pendek dan meningkatkan efisiensi ekonomi, penelitian juga menunjukkan dampak negatifnya. Sering kali masyarakat lokal tidak dilibatkan secara partisipatif sebagai tenaga kerja dalam proses pembangunan, dan ada kekhawatiran tentang fungsionalitas proyek di beberapa daerah yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pembangunan yang terpusat di perkotaan dapat memperburuk ketidakmerataan hasil pembangunan, menciptakan kesenjangan kesejahteraan antara kota dan desa, serta memarginalisasi kelompok-kelompok tertentu yang tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan tersebut (Almasiyah, 2021). Ini menunjukkan kegagalan "*trickle-down effect*" dalam konteks otoritarianisme kompetitif. Asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dari proyek infrastruktur besar akan secara otomatis "menetes ke bawah" dan meningkatkan kesejahteraan serta kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat cenderung tidak terwujud ketika akuntabilitas dan partisipasi publik dilemahkan. Bukti dari Surabaya menunjukkan bahwa proyek-proyek ini justru dapat memperparah ketimpangan dengan mengorbankan mata pencarian tradisional dan lingkungan, sementara keuntungan lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak.

9. Data Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Surabaya

Tabel 4. Data Kemiskinan Tahun 2023 dan 2024 di Kota Surabaya

Tahun	Presentase Penduduk Miskin (angka Kemiskinan) (persen)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2023	4,65%	136,37 ribu jiwa
2024	3,96%	116,62 ribu jiwa

Sumber : BPS Kota Surabaya

Meskipun pemerintah pusat mengklaim keberhasilan dalam penurunan kemiskinan melalui kebijakan jaminan sosial yang lebih terstruktur dan menyeluruh (Prasetyo dan Yoga, 2024), data BPS memberikan gambaran yang lebih rinci tentang angka kemiskinan Kota Surabaya pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,65%, menunjukkan penurunan sebesar 1,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Surabaya adalah 116,62 ribu jiwa dengan persentase 3,96%.

Tabel 4. Ketimpangan Pendapatan Kota Surabaya

Indikator Kinerja Makro	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan (%)
Angka Indeks Gini	0,38	0,42	9,02 %

Sumber : BPS Kota Surabaya

Gambar 5 dan 6. Gini Ratio Provinsi Jawa Timur dan Gini Ratio Indonesia



Sumber: BPS Statistik Indonesia dan Bappeda Jatim

Namun, terkait ketimpangan, Indeks Gini Kota Surabaya pada tahun 2023 adalah 0,42, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan sedang. Sebagai perbandingan, Gini Ratio Provinsi Jawa Timur pada Maret 2024 tercatat 0,372. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin menurun, kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin masih menjadi isu yang relevan di Kota Surabaya. Data Gini Ratio Indonesia pada September 2024 adalah 0,381, sedikit meningkat dari Maret 2024 (0,379).

KESIMPULAN

Analisis dampak kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024) di Kota Surabaya menunjukkan gambaran yang kompleks dan dualistik. Di satu sisi, terdapat upaya signifikan dalam modernisasi pelayanan publik melalui digitalisasi, yang tercermin dari penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diraih Kota Surabaya dan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terintegrasi. Selain itu, program-program lokal juga diimplementasikan untuk meningkatkan akses pekerjaan, seperti pembentukan Rumah Padat Karya, bursa kerja digital, dan pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, di sisi lain tantangan dalam akses pekerjaan masih sangat terasa bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas. Mereka menghadapi hambatan struktural dan kultural, termasuk diskriminasi dalam perekrutan dan kurangnya penegakan regulasi kuota disabilitas, yang belum sepenuhnya teratasi oleh kebijakan yang ada. Kualitas pelayanan publik, meskipun inovatif secara digital, masih dibayangi oleh isu birokrasi yang berbelit, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, dan potensi praktik pungutan liar (pungli), yang mengindikasikan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya mengatasi masalah-masalah struktural dan budaya organisasi yang mendasar. Konteks autokratisasi nasional, dengan konsolidasi kekuasaan eksekutif dan pelemahan lembaga pengawas, memiliki implikasi penting di Surabaya. Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui proyek-proyek infrastruktur besar, meskipun bertujuan untuk kemajuan, berisiko memperburuk ketimpangan sosial dan mengorbankan mata pencarian masyarakat lokal, seperti nelayan di Surabaya *Waterfront Land*, jika tidak diimbangi dengan partisipasi publik yang kuat dan akuntabilitas yang transparan. Meskipun data kemiskinan menunjukkan penurunan, Indeks Gini yang relatif stagnan mengindikasikan bahwa kesenjangan

pendapatan antara kelompok kaya dan miskin masih menjadi masalah yang relevan, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum merata secara substansial. Pemerintah Kota Surabaya perlu merumuskan program akses pekerjaan yang lebih terpersonalisasi dan responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok rentan. Upaya ini mencakup pelatihan yang disesuaikan bagi penyandang disabilitas, program pemberdayaan ekonomi yang menargetkan perempuan di sektor formal, serta penguatan dukungan terhadap pekerja informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Casmiwati, D., Zubir Bin Ibrahim, A., Binti, Z., Zain, M., & Abubakar, A. H. (2019). The effect of reclamation of Lamong Bay Port toward fishermen livelihood in Morokrembangan, Surabaya, Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 3(8), 2454–6186. <http://www.rsisinternational.org>
- Almasiyah, C. (2021). Analisis dampak pembangunan infrastruktur terhadap tingkat pendapatan UMKM di wilayah Kenjeran Surabaya. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Arka, Y., & Mulyawan, A. (2024, Mei 27). Pemkot Surabaya raih penghargaan SPBE terbaik dari Presiden Jokowi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/27/17554111/pemkot-surabaya-raih-penghargaan-spbe-terbaik-dari-presiden%E2%80%91jokowi>
- Azhar, M. (2024, Mei 29). Presiden Jokowi meluncurkan GovTech INA Digital untuk transformasi layanan publik. *GovInsider*. <https://govinsider.asia/indo-en/article/presiden-jokowi-luncurkan-govtech-ina-digital-untuk-transformasi-layanan-publik>
- Budiarti, A., Wicaksana, D., Arianto, G., Aulia, K., Suanti, K., Sabrina, G., Febry, P., Lestiana, F., Akdom, A., Putri, A., Christabel, V., & Harstina. (2022). Laporan penelitian survei kebutuhan hukum bagi kelompok rentan. *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, 11(1).
- Carothers, T. (2024). Prabowo's Indonesia: Inheriting democracy at dusk? *Carnegie Endowment for International Peace*. <https://carnegieendowment.org/research/2024/10/prabowos-indonesia-inheriting-democracy-at-dusk?lang=en>
- Christy, J. (2025, Juni). Surabaya jadi kota pertama, LPMK dan BPJS Ketenagakerjaan perluas jaminan sosial, lindungi tukang becak hingga PKL. *Jawa Pos*. <https://www.jawapos.com/surabaya-rama/016096939/surabaya-jadi-kota-pertama-lpmk-dan-bpjs-ketenagakerjaan-perluas-jaminan-sosial-lindungi-tukang-becak-hingga-pkl>
- Febriandy, R., & Wahid, U. (2024). Kemunduran demokrasi di Indonesia: Analisis laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(2), 1041–1050. <https://doi.org/10.31539/KAGANGA.V7I2.12392>
- Isnaini, W., Ilato, R., & Igrisa, I. (2025). Kualitas pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan di Desa Mataindaha Kecamatan Pasi Kolaga Kabupaten Muna, 2, 147–154.
- Kominfo Jawa Timur. (2025, Maret 8). Layanan publik makin dekat, Pemkot Surabaya buka sentra di Joyoboyo. *Kominfo Jatim*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/layanan-publik-makin-dekat-pemkot-surabaya-buka-sentra-di-joyoboyo>
- Larasati, A., Hartono, S., & Radjikan. (2024). Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya Jawa Timur. *Jurnal Sosial Politik Unla*, 4(3), 7–13.
- Mawardi, R. (2023). Dilema pembangunan di Indonesia: Analisis mengenai dampak dan implikasi kebijakan pembangunan era Presiden Joko Widodo. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2(1), 39–62. <https://doi.org/10.59066/jmi.v2i1.246>
- Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. (2023, Februari 3). Waspada modus pelayanan publik berujung pungli. *Ombudsman RI*. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--waspada-modus-pelayanan-publik-berujung-pungli>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2022, November 19). Angka pengangguran di Surabaya turun, Wali Kota Eri Cahyadi: Berarti APBD berhasil. *Surabaya.go.id*.

- <https://surabaya.go.id/id/berita/70820/angka-pengangguran-di-surabaya-turun-wali-kota-eri-cahyadi-berarti-apbd-berhasil>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2025, Mei). Pemkot Surabaya kurangi pengangguran lewat bursa kerja. ANTARA News. <https://jatim.antaranews.com/berita/921841/pemkot-surabaya-kurangi-pengangguran-lewat-bursa-kerja>
- Prasetyo, & Yoga, A. (2024, Oktober 15). Kesejahteraan masyarakat di era Jokowi, dari pengentasan kemiskinan hingga nasib kelas menengah. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/15/18374351/kesejahteraan-masyarakat-di-era-jokowi-dari-pengentasan-kemiskinan-hingga?page=all>
- Saputra, S. (2024, Oktober 15). 10 tahun Jokowi: 8 potret buram proyek strategis nasional. Mongabay.co.id. <https://mongabay.co.id/2024/10/15/10-tahun-jokowi-8-potret-buram-proyek-strategis-nasional/>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, November). Pemerintah siapkan Kartu Prakerja untuk tingkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Presiden RI. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/pemerintah-siapkan-kartu-prakerja-untuk-tingkatkan-daya-saing-tenaga-kerja-indonesia/>
- Universitas Negeri Surabaya. (2025, Februari 18). Pendidikan non-formal sebagai sarana inklusi sosial bagi kelompok rentan. Unesa. <https://pls.fip.unesa.ac.id/post/pendidikan-non-formal-sebagai-sarana-inklusi-sosial-bagi-kelompok-rentan>
- Validnews. (2024, April 30). Mengulas janji ekonomi Jokowi dan dampaknya terhadap rakyat. Validnews.id. <https://validnews.id/opini/mengulas-janji-ekonomi-jokowi-dan-dampaknya-terhadap-rakyat>
- Yulianto, A., & Eny, S. (2021). Kesadaran hukum perusahaan swasta di Kota Surabaya dalam memperkerjakan penyandang disabilitas (Studi PT. Adviant Berkat Mandiri). *Hukum: Novum*, 20(8), 1–12.